

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KAB. MUNA 2019-2021



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUNA
TAHUN 2019



**BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terarah dan berkesinambungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2019-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.



5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi adalah:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Pemerintah Kabupaten Muna agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
- b. menjadi instrumen yang akan memandu perubahan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki;
- c. menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi;
- d. menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang dari mana dan akan ke mana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi;
- e. menjadi dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi di setiap unit kerja.



Pasal 3

Tujuan penyusunan road map reformasi birokrasi adalah:

- a. adanya kesamaan pemahaman semua pihak yang terlibat dalam semua program reformasi birokrasi; dan
- b. memudahkan efektivitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.

BAB III

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. organisasi;
 - b. tatalaksana;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber daya manusia aparatur;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. pelayanan publik; dan
 - h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2019 – 2021 dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 8 (delapan) program reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2019 – 2021 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 29 - 4 - 2019

BUPATI MUNA,

ttd

L.M. RUSMAN EMBA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR 19



DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Muna No. 19 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab. Muna Tahun 2019 – 2021	i
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Reformasi Birokrasi dan Road Map Reformasi Birokrasi.....	2
C. Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi	2
Bab II Gambaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna	3
A. Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.....	3
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Muna Tahun 2016-2021	9
C. Identifikasi Permasalahan Birokrasi.....	22
D. Capaian Kinerja Pembangunan Melalui Reformasi Birokrasi..	27
E. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan Atas Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna	38
Bab III Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna.....	42
A. Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna	42
B. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna	43
C. Tujuan, Sasaran, Indikator Keberhasilan dan Dampak yang Diharapkan dari Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna.....	46
D. Rencana Program, Kegiatan, dan Outcome yang Diharapkan dari Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna.....	48
E. Rencana Aksi dan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna	53
F. Quick Wins	94
Bab IV Monitoring dan Evaluasi.....	111
Bab V Penutup	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, harmonisasi dan *streamlining* berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem SDM yang mampu mendorong kinerja organisasi, dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan disatu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.



Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Muna menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Muna.

B. Tujuan Reformasi Birokrasi dan Road Map Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna secara umum adalah untuk mewujudkan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematis untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab serta menghasilkan berbagai inovasi dalam rangka memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna 2019-2021 adalah memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

C. Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengiringi upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja Pemerintah Kabupaten Muna yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan semua aspek yang mendukung. Faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, antara lain komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan Reformasi Birokrasi dan dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna, komitmen pimpinan sangat diharapkan.



BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI

KABUPATEN MUNA

A. Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

Kabupaten Muna merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Kabupaten Muna memiliki luas wilayah 2.057,69 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara;
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muna Barat;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Tengah.

Kabupaten Muna terbagi atas 22 Kecamatan, 26 Kelurahan, dan 123 Desa dimana Kecamatan Tongkuno merupakan Kecamatan terluas yaitu 440,98 Km² atau 21,43% dari luas wilayah Kabupaten Muna secara keseluruhan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Duruka dengan luas 11,52 Km² atau 0,56% dari total luas wilayah Kabupaten Muna.

Dari 22 Kecamatan tersebut, terdapat 18 Kecamatan yang merupakan Kecamatan Pesisir dengan 55 Desa Pesisir. Serta terdapat 4 Kecamatan yang merupakan Kecamatan Non Pesisir dengan 68 Desa Non Pesisir.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Muna terus berbenah dan berkomitmen untuk melakukan perubahan guna mewujudkan tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, melalui 8 (delapan) area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi yang meliputi seluruh aspek



manajemen pemerintahan, yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan pelayanan publik serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja aparatur.

Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistematis dan sinergis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu melakukan Identifikasi Kondisi Umum Birokrasi saat ini.

Jika dilihat dari sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Muna, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Muna selama 2 tahun berturut-turut (2017 dan 2018) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Sebagian besar pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai wujud transparansi penyelenggara negara.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan terus dikembangkan.

Pada sasaran reformasi birokrasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Muna, sebagai berikut:

- a. Pasca penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka telah dilakukan revisi dan penyusunan SOP-AP bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota



dengan nomenklatur Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.

- c. Telah dikembangkan e-Government di Kabupaten Muna dengan menggunakan beberapa aplikasi fungsional dalam pelaksanaan manajemen internal dan pelayanan publik. Berikut ini beberapa aplikasi yang digunakan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sebagaimana daftar berikut ini.

**Daftar Aplikasi Yang Dipergunakan
Untuk Melaksanakan Manajemen Internal Birokrasi
Dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kab. Muna**

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	OPD Pengelola
1	2	3	4
I	Layanan Publik		
1.	Sistem Informasi Tenaga Kerja	a. IPK (Informasi Pasar Kerja) b. SAIBA c. BADN d. SAS e. SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.	Sistem Informasi Pendidikan	a. DAPODIK Siswa b. PDSPK c. SITU d. NUPTK e. APK/APM f. Si Pintar g. Krisna h. Simdak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	OPD Pengelola
1	2	3	4
		i. Verval Diknas j. Verval Satuan	
3.	Sistem Informasi Kesehatan	a. SIK (Sistem Informasi Kesehatan) b. ASPAK (Aplikasi Sarana dan Prasarana Kesehatan) c. Komdat Online (Komunikasi Data Online) d. SPM Online (Standar Pelayanan Minimal Online) e. SITT (Sistem Informasi Tuberkolosis Terpadu) f. ASISMAL (Aplikasi Sistem Malaria) g. SIK Gizi (Sistem Informasi Kesehatan Gizi)	Dinas Kesehatan
		SIA RS (Sistem Informasi Administrasi Rumah Sakit)	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nex Generation)	Dinas Sosial



No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	OPD Pengelola
1	2	3	4
5.	Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	a. SIKP (Sistem Informasi Kredit, Program) b. ODS (Online Data Sistem)	Dinas Koperasi dan UKM
6.	Sistem Informasi Pertanian	RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Online)	Dinas Tana- man Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
7.	Sistem Informasi Pembanguna Daerah	a. Muna Plan b. SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) c. SIMLARAS d. KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)	Bappeda
8.	Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	SIMAYA (Sistem Administrasi Persuratan)	Dinas Komunifo, Statistik dan Persandian
9.	Sistem Informasi Tata Ruang, Jalan dan Jembatan	a. e-Mon (Elektronik Monitoring) b. SiPDJD (Sistem Informasi Pengelolaan Data Jalan Daerah) c. OM SPAN (Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	OPD Pengelola
1	2	3	4
II Administrasi dan Manajemen Umum			
1.	Sistem Informasi Pengadaan	Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Bag. Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Muna
2.	Sistem Informasi Pembangunan	SISMONTEK (Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan)	Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Muna
3.	Sistem Pelaporan Kinerja	Sistem Monitoring, Evaluasi Kinerja (SIMONIEK)	Bagian Ortala Setda Kab. Muna.
III Manajemen Keuangan			
1.	Sistem Manajemen Keuangan	SIMDA	Badan Keuangan dan Aset Daerah dan dipakai semua OPD
IV Sistem Informasi Keuangan Daerah			
1.	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	SIMDA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
V Manajemen Kepegawaian			
1.	Sistem Informasi Kepegawaian	SAPK (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian)	BKPSDM



B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kab. Muna Tahun 2016-2021

1. Visi

Visi merupakan gambaran arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Dengan demikian visi pembangunan Kabupaten Muna adalah potret kondisi obyektif Kabupaten Muna yang akan dicapai pada akhir periode 2016-2021.

Rumusan visi misi mengacu pada permasalahan dan potensi pembangunan daerah sebagai isu strategis yang harus diselesaikan dalam program jangka menengah yang sejalan dengan tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Muna, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, serta prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka Visi Kabupaten Muna adalah: **“Muna Yang Kuat, Mandiri, Berdaya Saing, dan Bermartabat”**

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*key words*) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Muna. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang jelas, terarah, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi. Kata kunci atau pokok-pokok dari visi yang dimaksud adalah Kuat, Mandiri, Berdaya Saing, dan Bermartabat. Adapun pokok-pokok visi dijelaskan sebagai berikut:

a. Kuat

Kuat berarti bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat memiliki kemampuan, tujuan, semangat, dan daya tahan yang baik dalam upaya mewujudkan Visi-Misi. Salah satu bentuk konkrit dari penjelasan kata kuat berarti Pemerintah Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk bekerja membangun



daerah, baik dalam bentuk fisik maupun pemikiran untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

b. Mandiri

Mandiri berarti bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat berupaya mengoptimalkan seluruh potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Muna untuk mendukung berbagai program dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, daerah memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan sendiri pelbagai permasalahan ada secara bertahap dan terencana.

c. Berdaya Saing

Berdaya saing memiliki makna bahwa pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat berkompetisi dengan daerah lain. Selain itu, beragam produk yang dihasilkan memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, sehingga peluang pasar lebih terbuka dibanding produk-produk daerah lain yang sudah ada. Dan tentu saja, untuk upaya mengoptimalkannya, niscaya harus ditunjang oleh para ahli yang berpengalaman di bidangnya, sehingga kualitas produk benar-benar teruji dan unggul. Oleh karena itu, masyarakat kabupaten Muna akan berorientasi pasar (market) yang didasarkan pada aspek *supply and demand approach*.

d. Bermartabat

Bermartabat menunjuk kepada derajat/kedudukan yang mulia yang ditopang oleh nilai-nilai religius, budaya, nilai-nilai kemanusiaan, bahkan faktor ekonomi. Dari sisi ekonomi, misalnya, salah satu makna bermartabat terletak pada adanya kesempatan bekerja bagi setiap individu/penduduk (adanya akses ke aset). Karena masalah kerja merupakan salah satu bentuk pernyataan jati diri manusia. Jika individu/manusia



tidak bekertja, maka secara sosial ekonomi, individu/ manusia bersangkutan bermasalah. Karena itu, pemerintah daerah berkewajiban membuka ruang kebijakan dan program yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat yang dipimpinya. Maraknya kekerasan sosial di Kota Raha, misalnya, sebetulnya salah satunya dipicu oleh faktor sosial ekonomi yang terkait dengan tidak adanya lapangan kerja yang tersedia.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga rumusan misi membantu lebih jelas dalam menggambarkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Muna yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan, yaitu: “Muna Yang Kuat, Mandiri, Berdaya Saing, dan Bermartabat”.

a. Visi 1 (Kuat), didukung oleh Misi:

1) Revitalisasi Pemerintahan daerah

Pada dasarnya, untuk mendukung pencapaian visi-misi ini, diperlukan adanya pemerintahan yang baik karena semuanya didukung oleh program dan kebijakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Muna menganut prinsip demokratis, adil, transparan, partisipatif, efektif, efisien, akuntabel, dan kemitraan yang sesuai peraturan perundang-undangan (*rule of law*) melalui kepemimpinan yang amanah. Dengan begitu, implementasi prinsip *good governance* akan berkembang secara kondusif di bawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas. Pada tataran implementasi prinsip-prinsip *good governance*, akan disertai penerapan kebijakan yang jelas, penempatan personil/aparatur yang kredibel, dan kehidupan



politik birokrasi yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

2) Memberdayakan dan mengembangkan ekonomi dan pemerintahan desa

Desa akan menjadi basis program dan kegiatan pembangunan (Membangun Muna dari Desa) sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang tercantum dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Pada saat yang sama, penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik, juga akan dilakukan.

3) Memberdayakan perempuan dan pemuda

- Saat ini, posisi perempuan bukan lagi sebagai subordinasi dari laki-laki. Tetapi, baik perempuan maupun laki-laki sebetulnya memiliki posisi setara dalam proses-proses pembangunan. Karena itu, keterlibatan perempuan (pemberdayaan perempuan) dalam pengelolaan pembangunan daerah merupakan keniscayaan yang tak bisa ditawar, sesuai dengan program Kementerian Perempuan khususnya terkait isu pengarusutamaan gender.
- Unsur pemuda merupakan kekuatan utama yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa/daerah ke depan. Karena itu, potensi kepemudaan akan dioptimalkan dalam rangka meningkatkan prestasi dan kesejahteraan masyarakat.

4) Mempercepat pemerataan infrastruktur pembangunan daerah

- Untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, sarana dan prasarana pertanian, perhubungan, pariwisata, listrik, dan air bersih.
- Agar lebih optimal pemanfaatan infrastruktur tersebut, diperlukan program lintas SKPD untuk menunjang



keberhasilan program unggulan masing-masing SKPD terkait.

- Sudah waktunya dibangun universitas di kabupaten Muna, dengan maksud dapat menempatkan lulusan SMU/SMK dan sekaligus memberikan efek penghematan pengiriman biaya studi perguruan tinggi bagi mahasiswa di luar kabupaten Muna, juga sekaligus dapat membuka lapangan kerja baru sebagai dampak berdirinya universitas baru seperti rumah kost, rumah makan, ATK, dsb.

5) Revitalisasi Tata Ruang Wilayah

Pada prinsipnya, semua pembangunan yang bersifat fisik akan beralokasi di atas wilayah kabupaten Muna. Oleh karena itu, diperlukan penataan wilayah (termasuk tata guna tanah) untuk memastikan terbentuknya tata wilayah yang efektif. Selanjutnya, diperlukan peta Tata Guna Tanah (TGT) agar lebih memudahkan pengalokasian program pemberdayaan dan pemanfaatan ruang (wilayah) sesuai dengan tata ruang daerah pembangunan perumahan dan tata ruang kota Raha yang perlu ditata dengan baik agar memenuhi syarat perkotaan yang sehat.

b. Visi 2 (Mandiri), didukung oleh Misi:

- 1) Mengembangkan swasembada pangan dan optimalisasi potensi perikanan
 - Dalam konteks ini, swasembada pangan yang dimaksud, bukan berarti hanya berupa beras saja, tetapi juga pangan lainnya yang sesuai kondisi lahan pertanian masyarakat setempat.
 - Potensi hutan rakyat juga harus dikelola dengan baik guna memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan potensi



pertambangan yang ada di kabupaten Muna, tentu harus dieksplorasi dan dieksploitasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Memenuhi pelayanan dasar masyarakat

Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan di kabupaten Muna harus mencermati kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang harus tersedia seperti pendidikan, kesehatan, pasar (di kota, kecamatan, dan desa), air bersih, listrik, termasuk pendidikan keagamaan, (pesantren, TPA, dsb.) yang membentuk manusia yang berakhlak, bermoral, dan berkarakter yang baik.

c. Visi 3 (Berdaya Saing), didukung oleh Misi: Mengembangkan ekonomi kawasan (lokal dan regional) dan pariwisata

- Posisi kota Raha saat ini sebetulnya sangat strategis. Di sebelah Timur adalah Buton Utara. Di sebelah Barat yakni Muna Barat. Di sebelah Utara adalah Konawe Selatan. Dan di sebelah Selatan, adalah Buton Tengah. Dalam posisi kota Raha seperti itu, kota Raha ke depan sebetulnya sebetulnya bisa dikembangkan menjadi kota tujuan dan/atau kota transit.
- Dalam konteks demikian, maka kota Raha perlu mewarnai kemajuan ekonomi kawasan yang sekaligus dapat memberikan efek positif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muna.
- Sangat banyak potensi pariwisata di kabupaten Muna yang perlu dikembangkan secara optimal, antara lain; (1) wisata gua Liangkobori; (2) wisata budaya (kota Muna di Tongkuno lama); (3) wisata air di dalam gua di Walengkabola; dsb. Karena itu, penting mengembangkan potensi pariwisata ini sebagai salah satu basis ekonomi masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan PAD.



- d. Visi 4 (Bermartabat), didukung oleh Misi: Revitalisasi nilai-nilai religius, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan
- Salah satu masalah serius yang ada di tengah masyarakat Kabupaten Muna adalah rendahnya sikap saling menghargai, yang antara lain kita bisa melihatnya melalui perkelahian antar lorong. Kita kadang merasa tidak aman bila berjalan di malam hari (khususnya di tempat-tempat tertentu di dalam kota Raha), akibat kurang amannya suasana kehidupan sosial perkotaan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat basis moral masyarakat melalui revitalisasi nilai-nilai religius, budaya, dan kemanusiaan, dalam rangka mendorong penguatan peradaban sosial yang lebih kuat.
 - Dari perspektif budaya, masyarakat Muna sebetulnya memiliki istilah “*pointao*” yang artinya adalah saling menghargai, saling membesarkan, saling mendukung, saling melindungi yang disertai adanya saling pengakuan secara tulus dalam hubungan-hubungan sosial kultural, baik berbasis antar individu maupun antar kelompok ataupun antara individu dan kelompok. Bahkan, pada derajat tertentu, *pointao* dapat disebut sebagai *social natural of life* bagi masyarakat Muna yang terkait dengan nilai-nilai modal sosial.
 - Oleh karena itu, nilai-nilai “*pointao*” ini akan ditransformasi ke dalam kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMU/SMK) sebagai salah satu pembelajaran muatan lokal. Pelaksanaan nilai-nilai “*pointao*” ini dapat menjadi pintu gerbang untuk memasuki peradaban masyarakat yang lebih baik serta memperkuat martabat sosial yang lebih mulia.



- Dari sisi ekonomi, misalnya, salah satu makna bermartabat terletak pada adanya kesempatan bekerja bagi setiap individu/penduduk (adanya akses ke aset). Karena masalah kerja merupakan salah satu bentuk pernyataan jati diri manusia. Jika individu/manusia tidak bekerja, maka secara sosial ekonomi, individu/manusia bersangkutan bermasalah. Karena itu, pemerintah daerah berkewajiban membuka ruang kebijakan dan program yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat yang dipimpinnya. Maraknya kekerasan sosial di Kota Raha, misalnya, sebetulnya salah satunya dipicu oleh faktor sosial ekonomi yang terkait dengan tidak adanya lapangan kerja yang tersedia.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Muna 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan (2016-2021), yakni:



Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Muna Tahun 2016-2021

No.	Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir (2021)
1.	Revitalisasi Pemerintahan Daerah			
	Tujuan: Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang profesional dan kompeten	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mencapai derajat "memuaskan". Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan akuntabilitas Kinerja & Keuangan Pemerintahan daerah 	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik - Nilai Lakip - Nilai LPPD - Opini BPK	Nilai 4 (Memuaskan) A A WTP
2.	Memberdayakan dan mengembangkan ekonomi dan pemerintahan desa			
	a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Muna	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya PMDN Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Meningkatnya produksi Ternak Meningkatnya Produksi Perkebunan Meningkatnya Perekonomian Daerah 	Persentase tingkat PMDN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persentase peningkatan populasi sapi pertahun Persentase peningkatan produksi mete - Pertumbuhan Ekonomi Tingkat inflasi di atas inflasi Sulawesi Tenggara	15 2,5 15 10%/Thn Min. 7%/Thn 0



No.	Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir (2021)
	b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas dan Percepatan Pembangunan Desa 	Indeks Desa Membangun	
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 	- Angka Kemiskinan	7,5
			- Peningkatan Income perkapita (harga berlaku)	40,92
3.	Memberdayakan perempuan dan pemuda			
	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan	Indeks Pemberdayaan Gender	
4.	Mempercepat pemerataan infrastruktur pembangunan daerah			
	Mempercepat pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dalam mendukung akses dan mobilitas barang dan orang bagi wilayah-wilayah strategis 	Persentase kualitas jalan dalam kondisi mantap	70
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengembangan dan penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Muna 	Persentase kemajuan pengembangan dan penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Muna	50
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman 	Persentase rumah layak huni	100



No.	Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir (2021)
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan jaringan air minum 	100
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan 	100
		<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana layanan pendidikan 	Persentase bangunan gedung dan sarana penunjang SD dalam kondisi baik dan sedang	100
		<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kuantitas fasilitas sarana dan prasarana layanan kesehatan 	Persentase kondisi unit-unit pelayanan kesehatan dalam kondisi baik dan sedang	100
5.	Revitalisasi Tata Ruang Wilayah			
	a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	b. Meningkatkan kesesuaian dan kepatuhan pada Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Muna	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya 	Rata-rata tingkat penggunaan lahan yang sesuai tata ruang	100
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketersediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur strategis 	Persentase lahan siap guna bagi kegiatan pembangunan infrastruktur strategis	100



No.	Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir (2021)
6.	Mengembangkan Swasembada Pangan dan Optimalisasi Potensi Perikanan			
a.	Meningkatkan kualitas ketahanan pangan wilayah	Meningkatnya cadangan pangan daerah/wilayah	Tingkat Penguatan Cadangan Pangan	13
b.	Mengembangkan produksi hasil perikanan tangkap dan budidaya serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan (%)	190,847
7.	Memenuhi pelayanan dasar masyarakat			
a.	Meningkatkan derajat pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Manajemen pelayanan Pendidikan Meningkatnya Akses, kuantitas dan kualitas layanan Pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat 	<ul style="list-style-type: none"> - Angka rata-rata lama sekolah - Angka melek huruf penduduk berusia > 15 tahun - APM SD/MI/Paket A - APM SMP/MTs/ Paket B - Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs. - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA 	<ul style="list-style-type: none"> 8,5 100 100 100 100 100



No.	Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir (2021)
	b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	Angka usia harapan hidup	70,6
	c. Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam KB dan terciptanya keluarga sejahtera yang berkualitas	KB aktif	83,53
8.	Mengembangkan ekonomi kawasan (lokal dan regional) dan pariwisata			
	a. Meningkatkan perdagangan antar wilayah kabupaten/kota di Sultra, nasional, dan internasional	Meningkatnya permintaan dan penawaran jenis produksi pertanian dan perkebunan	- Pertumbuhan PDRB sub sektor Pertanian Tanaman Pangan (%) - Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan (%)	
	b. Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara	Kunjungan wisata	25,519
9.	Revitalisasi nilai-nilai religius, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan			
	a. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai silaturahmi	Menguatnya hubungan-hubungan sosial keagamaan dalam masyarakat	- Persentase Lembaga Keagamaan Yang Mendapatkan	



No.	Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir (2021)
	dalam kehidupan sosial keagamaan		Bantuan (%) - Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (%)	
	b. Mengembangkan tata nilai lokal dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan	Meningkatnya tata nilai lokal (pointao) dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan Adat	100

C. Identifikasi Permasalahan Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada 8 (delapan) area Perubahan, sebagai berikut:

a. Penataan dan Penguatan Organisasi

Permasalahan pada area organisasi adalah kelembagaan organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural, berkembangnya lembaga non struktural sebagai amanat peraturan perundang-undangan sektoral, mengakibatkan ketepatan fungsi dan ukuran organisasi perangkat daerah belum memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan, sasaran strategis serta visi misi.

b. Ketatalaksanaan

Permasalahan pada area ketatalaksanaan adalah pelaksanaan *bussines proses* penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung hanya pemenuhan administratif, belum seluruh aspek ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terstandardisasi, sistem dan prosedur birokrasi belum berjalan cepat dalam



merespon pelayanan publik, dan belum didukung penggunaan teknologi informasi secara memadai. Hal ini menyebabkan pegawai atau petugas terkait merasa berada pada pihak yang dibutuhkan, dicari serta yang memiliki kewenangan.

Sedangkan, pada proses bisnis untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi di unit-unit kerja, dibutuhkan adanya instrument yang bersifat teknis. Instrumen tersebut menggambarkan bagaimana suatu proses pelaksanaan kegiatan dilakukan yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, SOP yang di buat pada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna saat ini belum melalui tahap evaluasi dan penetapan oleh Kepala Daerah. Belum adanya SOP yang baku tersebut mengakibatkan tidak ada kejelasan mengenai waktu, biaya maupun sasaran program dan kegiatan.

c. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan pada area peraturan perundang-undangan adalah belum terlaksananya evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan apakah terjadi tumpang tindih atau terjadi ketidakharmonisan satu dengan yang lainnya dan belum semua penyelenggaraan urusan pemerintahan dibuatkan regulasinya, masih terdapat Peraturan perundang-undangan di daerah yang belum selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan masih terdapat multi tafsir, inkonsisten terhadap peraturan daerah. Disamping itu masih ada peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Permasalahan pada area sumber daya aparatur adalah penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi sehingga pada beberapa Satuan Kerja



terjadi *mismatch* dalam kompetensi, distribusi pegawai tidak proporsional dengan beban kerja, kinerja aparatur yang rendah dan kurangnya disiplin, pola karier belum dilaksanakan dengan baik, pendidikan dan latihan belum didasarkan kepada perencanaan kebutuhan diklat dan penerapan penanganan pelanggaran disiplin PNS sulit dilakukan secara obyektif dan konsisten.

e. Pengawasan

Permasalahan pada area pengawasan adalah belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di masing-masing satuan kerja, cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan makin canggihnya modus penyimpangan menuntut peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan internal pemerintah secara berkesinambungan.

f. Akuntabilitas Kinerja

Permasalahan pada area Akuntabilitas Kinerja dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna antara lain:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum sinergis dan konsistennya pelaksanaan manajemen kinerja, dan masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja;
- 2) Sistem informasi kinerja pemerintah kabupaten belum berjalan optimal, sehingga proses penyusunan dokumen, penyampaian informasi, pengukuran kinerja, dan lain-lain masih lambat dan kurang terdokumentasi dengan baik;



- 3) Perbedaan kemampuan pejabat pengumpul/penyusun data LAKIP menyebabkan kualitas dokumen LAKIP Kabupaten yang disusun belum termasuk kategori baik;
- 4) Dokumen kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja dan masih banyak yang hanya memenuhi syarat/kewajiban administratif;
- 5) Koordinasi antar OPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan belum optimal, sehingga dalam penyusunan dokumen-dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sering kurang sinkron;
- 6) Belum semua Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam indikator RPJMD merupakan indikator kinerja yang baik. Ada beberapa yang tidak mudah untuk diwujudkan, ada yang sulit diukur, dan ada yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
- 7) Masih adanya kegiatan OPD yang tidak masuk dalam dokumen perencanaan awal, sehingga indikator kinerja yang akan dicapai tidak berkesinambungan;
- 8) Belum ada penilaian kinerja OPD secara komprehensif, sehingga capaian kinerja OPD pada akhir tahun belum menunjukkan kinerja yang sebenarnya dari OPD.

g. Pelayanan Publik

Permasalahan pada area pelayanan publik dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna, antara lain:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Sistem dan prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar pelayanan publik yang disusun;
- 3) Teknologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik;



- 4) Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi pada unit-unit pelayanan dan distribusi SDM yang kurang merata;
- 5) kurangnya pemantauan (pembinaan) dan pengawasan OPD terhadap unit-unit pelayanan publik;
- 6) kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan publik;
- 7) belum semua penyelenggara/pelaksana pelayanan publik mematuhi Standar Pelayanan yang telah dibuat.

h. Pola Pikir dan Manajemen Perubahan

Permasalahan-permasalahan pola pikir (*mind set*) dan Manajemen Perubahan dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna antara lain:

- 1) Belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat;
- 2) Belum optimalnya penegakan disiplin pegawai dalam mematuhi ketentuan jam dan hari kerja;
- 3) Belum optimalnya sistem pemberian *reward* dan *punishment*, mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) penilaian prestasi kerja pegawai belum obyektif, sehingga tidak mampu mendorong pegawai untuk berprestasi dalam melaksanakan tugas;
- 5) belum terbangunnya budaya kerja berbasis kinerja yang mengutamakan *output* dan *outcome* yang terukur dalam melaksanakan tugas;
- 6) belum ada peraturan/regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap;
- 7) kurangnya komitmen dan ketegasan pimpinan serta jajarannya sebagai panutan (*role model*);
- 8) belum terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam mewujudkan kinerja yang baik.



D. Capaian Kinerja Pembangunan Melalui Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Hal-hal yang telah dicapai dalam penataan dan penguatan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Program dan kegiatan kajian pembentukan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti:
 - reviu regulasi bidang kelembagaan OPD, dan Pengkajian naskah akademik pembentukan OPD dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi diharapkan akan terwujudnya kelembagaan OPD yang mampu membantu proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai kebutuhan daerah secara efektif dan efisien;
 - adanya reviu regulasi dibidang kelembagaan OPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah;
 - adanya naskah akademik pembentukan OPD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Program dan kegiatan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: Penyusunan Draf Raperda Pembentukan Kelembagaan OPD dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing OPD;



- c. Program dan kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: Penyusunan draf raperda pembentukan kelembagaan OPD dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing OPD; adanya draf raperda sebagai dasar perencanaan dalam pembentukan kelembagaan OPD untuk ditindaklanjuti bersama Bagian Hukum.
- d. Program dan kegiatan asistensi dan fasilitasi pembentukan UPTD/UPTB yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: reviu regulasi pembentukan UPTD/UPTB; pengkajian pembentukan UPTD/UPTB; penyusunan dokumen usulan pembentukan UPTD/UPTB serta penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD/UPTB dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya OPD paham dan mampu mengelola sistem dan mekanisme pembentukan UPTD/UPTB yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam membantu proses penyelenggaraan tugas-tugas OPD; adanya Regulasi pembentukan UPTD/UPTB secara berkala sesuai dengan UU, PP, Perpres, Permen, Perda dan Perbup yang berlaku; adanya dokumen pengkajian pembentukan UPTD/UPTB untuk memenuhi kebutuhan OPD; adanya Perbup Pembentukan UPTD/UPTB sebagai dasar perencanaan dalam memenuhi kebutuhan OPD.
- e. Program dan Kegiatan revisi Perbup Tupoksi OPD yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: pemetaan tugas pokok dan fungsi; kajian Perbup tupoksi OPD terkait; dan revisi Perbup tugas pokok dan fungsi OPD terkait dengan pencapaian program



dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya ketersesuaian peran dan fungsi OPD terhadap tupoksinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Penataan Tatalaksana

Berdasarkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi, Pemerintah Kabupaten Muna telah menetapkan kegiatan proses inti dan proses pendukung yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. Dengan program Penyusunan SOP OPD yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: inventarisasi SOP OPD; reviu SOP OPD; evaluasi pelaksanaan SOP OPD; penyusunan draft SOP; pembahasan draft SOP; penetapan SOP; dan sosialisasi SOP.

Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan:

- Pemerintah Kabupaten Muna mampu menyelenggarakan proses ke pemerintahannya melalui kinerja OPD yg bekerja berdasarkan pada SOP yang jelas, berkualitas, tepat fungsi dan ukuran; terkumpulkannya data SOP seluruh OPD di Pemerintahan Kabupaten Muna; adanya analisa dan terpetakannya kebutuhan SOP berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing OPD di Pemerintahan Kabupaten Muna;
- Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan SOP OPD di Pemerintahan Kabupaten Muna;
- Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan SOP OPD di Pemerintahan Kabupaten Muna;
- Tersusunnya draft revisi SOP OPD yang belum berkesesuaian pada tepat fungsi dan ukuran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Muna atau bahkan OPD yang belum memiliki SOP;



- Terbahasnya draft revisi SOP OPD oleh multi pihak terkait di lingkup pemerintahan Kabupaten Muna;
- Adanya masukan berkualitas dari multipihak terkait untuk draft SOP yg telah disusun;
- Direvisi dan ditetapkannya Surat Keputusan SOP OPD untuk mempercepat proses kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Muna yang berkualitas, efektif yang efisien;
- Pihak terkait khususnya lingkup OPD di Pemerintahan Kabupaten Muna mendapatkan informasi tentang SOP OPD yang telah ditetapkan sehingga terbangun komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan di OPD berdasarkan acuan SOP yang berkualitas, efektif dan efisien.

3. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan ke dalam Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Program dan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti:
 - pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah dan penyusunan kontrak serta konsultasi publik terkait produk hukum daerah dengan pencapaian program kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: teroptimalisasinya sistem hukum serta harmonisasi produk hukum daerah;
 - meningkatnya pemahaman aparatur terkait dengan penyusunan produk hukum daerah;



- b. Program dan kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti:
- Pelaksanaan rapat koordinasi rencana aksi HAM (RANHAM), pembinaan kelompok kadarkum.
 - Sosialisasi produk hukum melalui lomba kadarkum di tingkat kota dan provinsi dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terinformasikannya produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat Kabupaten Muna; tersusunya kegiatan pelaksanaan HAM dan pembinaan kelompok kadarkum; terinventarisasinya rekomendasi pelaksanaan HAM di Kabupaten Muna; terbinanya kelompok kadarkum untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran hukum; terlaksananya sosialisasi produk hukum yang berlaku melalui ajang lomba kadarkum yang dilakukan secara berkala.
- c. Program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemda bidang SJDI dan penyuluhan hukum, yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti:
- terselenggaranya penyuluhan hukum;
 - pengelolaan administrasi hukum; dan
 - dokumentasi produk hukum dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi.

Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemda yang sadar hukum, memiliki pengetahuan hukum yang berlaku, dan mampu mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; tersosialisasikannya produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat; terselenggaranya alur pengelolaan administrasi hukum yang



mendukung kinerja OPD; terdokumentasinya produk-produk hukum daerah sehingga mudah diakses oleh aparatur dan masyarakat.

- d. Program dan kegiatan pelayanan bantuan hukum pemda, yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: terselenggaranya kajian hukum dan konsultasi hukum, dan terselenggaranya kerjasama hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terselesaikannya kasus dan permasalahan hukum yang melibatkan pemda; tersusunnya dokumen kajian hukum dan konsultasi hukum yang lengkap, sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggung-jawabkan; terselesaikannya kasus-kasus bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur terdiri atas sepuluh kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Pemerintah Kab. Muna telah melakukan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis *IT integrated*, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Kaji Ulang SIMPEG, Penyusunan SIMPEG *IT Integrated*, Uji Coba SIMPEG *IT Integrated*, Sosialisasi SIMPEG *IT Integrated*. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan:
 - Terbangunnya data Kepegawaian berbasis SIMPEG dan integrasi yang mudah dan cepat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan;



- Adanya dokumen kaji ulang SIMPEG;
 - Adanya dokumen Penyusunan SIMPEG IT Integrated;
 - Terselenggaranya Uji Coba SIMPEG IT Integrated;
 - Adanya peningkatan pemahaman tentang SIMPEG IT Integrated untuk aparaturnya Kabupaten Muna.
- b. Program dan Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Reviu Regulasi Bidang Kepegawaian, Konsultasi Rekomendasi hasil reviu bidang kepegawaian. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: meningkatnya sumber daya aparaturnya bidang kepegawaian yang berkompeten dan melayani; adanya dokumen hasil reviu terhadap regulasi bidang kepegawaian yang mengkaji aturan yang dibutuhkan sesuai standar yang berbasis kompetensi; adanya dokumen hasil Konsultasi dan Rekomendasi hasil reviu bidang kepegawaian.
- c. Program dan Kegiatan Birokrasi terhadap Implementasi Regulasi ASN, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: konsultasi regulasi PP ASN, kajian regulasi PP ASN, sosialisasi regulasi PP ASN, implementasi PP ASN. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terlaksananya implementasi UU ASN yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Muna; adanya kajian regulasi PP ASN; adanya sosialisasi regulasi PP ASN; serta adanya implementasi PP ASN.
- d. Program dan Kegiatan Penyusunan Regulasi untuk Peningkatan Kapasitas Tematik SDM bidang kepegawaian, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Pelaksanaan Diklat Tematik SDM bidang kepegawaian. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terselenggara diklat tematik bidang kepegawaian yang handal



dan akuntabel; serta adanya kewenangan dalam pelaksanaan diklat mandiri.

- e. Program dan Kegiatan Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: menghimpun data jabatan pegawai dari masing-masing OPD; kajian terhadap Analisis Jabatan, kajian terhadap Analisis Beban Kerja, kajian terhadap evaluasi jabatan. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya manajemen SDM aparatur Negara yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi jabatan; adanya himpunan data pegawai tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab pegawai; adanya Kajian terhadap Analisis Jabatan di setiap OPD untuk mendapatkan informasi bentuk pekerjaan dalam rangka penataan kelembagaan; adanya Kajian terhadap Analisis Beban Kerja disemua OPD untuk memenuhi kebutuhan pegawai; serta adanya kajian terhadap Evaluasi Jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

5. Penguatan Pengawasan Intern

Dalam hal penguatan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Muna sudah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan Reviu kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga Pembina APIP (BPKP dan Kemendagri), yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: pengumpulan data terkait dengan pengelolaan kegiatan: reviu kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga pembina APIP (BPKP dan Kemendagri).

Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan:

- terlaksananya pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur Internal pemda yang terintegrasi melalui kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan;



- terkumpulnya data terkait dengan pengelolaan kegiatan:
 - reviu kebijakan pengawasan internal Pemerintah Daerah terhadap kebijakan lembaga pembina APIP (BPKP dan Kemendagri).
- b. Program dan kegiatan Tata Kelembagaan/OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing OPD, dengan kegiatan pelaksanaan seperti: Pengumpulan data. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terlaksananya pengawasan internal pemda yang terintegrasi melalui kebijakan pemda di bidang pengawasan; terkumpulnya data program Program OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing OPD.
- c. Program dan kegiatan Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas APIP untuk menunjang Fungsi Pengawasan, dengan kegiatan pelaksanaan Pengumpulan data. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: efektifitas pelaksanaan pengawasan yang memenuhi standar berdasarkan profesionalitas; terkumpulnya data penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas.
- d. Program dan kegiatan Pengembangan Sistem pelaporan berbasis IT, dengan kegiatan pelaksanaan Rapat persiapan; Pengumpulan data. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: mempercepat dan mempermudah sistem pengawasan berbasis IT; adanya hasil rapat; terkumpulnya data data OPD dalam pelaksanaan Pengembangan sistem pelaporan pengawasan yang berbasis IT.
- e. Program dan kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti:



- pengawasan internal secara berkala;
- penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya;
- inventarisasi temuan pengawasan;
- tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif;
- evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan:

- terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang bersih, melayani dan bebas dari KKN;
- adanya pemeriksaan kinerja, keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan beserta monev dan rencana tindak lanjut di seluruh OPD secara berkala berdasarkan standar pengawasan yang telah ditetapkan;
- terlayannya kasus pengaduan yang dapat ditindaklanjuti di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna;
- terlaksananya pelaksanaan sistem manajemen yang sesuai dengan standar dan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku di seluruh OPD dan unit kerja se-Kabupaten Muna;
- terlaksananya penyelesaian kasus pada wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna;
- tersedianya data temuan pengawasan sebagai bahan perencanaan program pengawasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna;
- ditindaklanjutinya temuan temuan hasil pemeriksaan dari APIP, eksternal dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna;



- terselenggaranya pelaksanaan koordinasi pengawasan antar APIP, pengawas eksternal dan lembaga pengawasan lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna;
- adanya data temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti yang di rekomendasikan kepada pihak terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Muna. Program penguatan akuntabilitas kinerja memiliki 6 (enam) kegiatan utama, yang meliputi:

- Bimbingan Teknis SAKIP;
- Penyusunan RPJMD Perubahan dan RENSTRA;
- Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Penetapan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja; dan
- Penyusunan Laporan Kinerja (LKPJ, LKPD, LPPD, LAKIP) dengan uraian tahapan kegiatan pada Peta Reformasi Birokrasi Pemda Kabupaten Muna.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Layanan prima merupakan upaya maksimal yang diberikan oleh petugas layanan dari suatu kementerian lembaga jasa pelayanan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan publik sehingga tercapai suatu kepuasan. Dapat diartikan bahwa pelayanan prima berorientasi pada kepuasan publik. Simpulan pengertian pelayanan prima mengandung makna: menempatkan dan membuat publik merasa penting; melayani publik dengan ramah, tepat dan cepat; mengedepankan dan mengutamakan kepentingan publik; menempatkan publik sebagai mitra; memberikan dan menghasilkan kepuasan publik.



8. Manajemen Perubahan

Hal-hal yang telah dicapai dalam rangka mengelola perubahan yang akan timbul sebagai akibat dari proses reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna telah melakukan beberapa persiapan yang dijabarkan dalam program manajemen perubahan dan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang dilakukan adalah reformasi sistem manajemen Aparatur Sipil Negara dan sosialisasi peraturan yang terkait dengan penegakan disiplin aparatur.

E. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan Atas Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi adalah Identifikasi Harapan Masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hal itu berarti bahwa dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun harus menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, maka harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Terwujudnya ASN Pemerintah Kabupaten Muna yang profesional dan berintegritas. Untuk itu masyarakat sangat mendambakan birokrat yang jujur, bebas KKN, berdedikasi tinggi, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian jumlah kasus korupsi di lingkungan birokrasi harus dikurangi;
2. Terwujudnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
3. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN;
4. Meningkatkan Nilai SAKIP dari “CC” ke “A”;



5. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Muna diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN (menjadi *role model* dan *agen of change*);
6. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan ASN pemerintah Kabupaten Muna sebagai bagian dari upaya pencegahan KKN.
7. Mempertahankan predikat WTP dari BPK.

Dalam kaitan dengan sasaran kedua reformasi birokrasi: Birokrasi yang Efektif dan Efisien, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Terwujudnya penataan kelembagaan yang *right sizing* (tepat fungsi tepat ukuran) dan tidak tumpang tindih;
2. Pemerintah Kabupaten Muna perlu menentukan batas akhir penerapan SOP-AP hingga Desember 2019 dengan peraturan Bupati. Bagi Perangkat Daerah yang tidak mengindahkan akan diberi sanksi;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*) demi efektifitas, efisiensi dan kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna. Oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Induk Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dengan Peraturan Bupati Muna;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
5. Terlaksananya penerapan SDM yang berbasis *merit system*;
6. Terwujudnya efisiensi anggaran sehingga belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur;



Dalam kaitan dengan sasaran ketiga reformasi birokrasi: Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas, maka harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Pada tahun 2021 seluruh pelayanan perizinan telah terintegrasi pelaksanaannya pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ke angka 80 atau masuk kategori “A” (Sangat Baik);
3. Mempertahankan dan meningkatkan predikat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah diperoleh;
4. Melahirkan satu inovasi pada setiap unit pelayanan publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang didukung oleh berbagai faktor, antara lain: kemudahan dan kecepatan pelayanan, kemudahan aksesibilitas pelayanan, SDM pelayanan yang berkompeten, Inovasi pelayanan publik serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan;
6. Setiap perangkat daerah menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan janji dalam Maklumat Pelayanan;
7. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik;
8. Pengelolaan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik secara elektronik yang terintegrasi dengan LAPOR-SP4N;
9. Peningkatan fasilitas umum dan sosial pada 22 kecamatan di Kabupaten Muna terutama di wilayah kepulauan dan terpencil;
10. Terwujudnya transformasi budaya dilayani menjadi melayani di seluruh level unit pelayanan dan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
11. Pemberian *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. *Reward* (penghargaan) diberikan kepada unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan *punishment* (hukuman) diberikan secara proporsional kepada pejabat yang



memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;

12. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.



BAB III

AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

A. Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi instansi pemerintah melakukan langkah-langkah konkret memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kabupaten Muna telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir walaupun Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi baru dibuat pada tahun 2019.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Setiap tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya.

Gambaran umum road map menuju kondisi dimana birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan akuntabel, adalah sebagai berikut:

2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> • Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi Reformasi Birokrasi secara konsisten. • Menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurnakan hasil-hasil yang sudah diperoleh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan tahun 2019. • Menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurnakan hasil-hasil yang sudah diperoleh tahun 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan tahun 2020. • Menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurnakan hasil-hasil yang sudah diperoleh tahun 2020. • Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi Birokrasi secara konsisten.



B. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna

Untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan bidang, yaitu:

1. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD) secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD) menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD); dan
- b) meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2. Program Penataan Tatalaksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada instansi pemerintah (OPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD);
- b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD); dan
- c) meningkatnya kinerja di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD).



3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD); dan
- b) meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD).

4. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD), yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparansi, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD);
- b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD);
- c) meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD);
- d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD); dan
- e) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD).



5. Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD);
- b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD);
- c) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD); dan
- d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD).

6. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD); dan
- b) meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD).

7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD) sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD);



- b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD); dan
- c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD).

8. Program Manajemen Perubahan

Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD) dalam melakukan reformasi birokrasi;
- b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD); dan
- c) menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

C. Tujuan, Sasaran, Indikator Keberhasilan dan Dampak yang Diharapkan dari Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna

1. Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna :
 - a. Pemerintah Kabupaten Muna yang bersih dan bebas KKN.
 - b. Efektifitas dan Efisiensi kegiatan pemerintahan.
 - c. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.



2. Sasaran

- a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dengan indikator: Integritas pelayanan publik dan peningkatan kemudahan berusaha.
- e. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator: Indeks efektivitas pemerintahan dan instansi pemerintah yang akuntabel.

3. Dampak yang diharapkan

- a. Pada area penataan dan penguatan organisasi adalah Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*Right Size and Right Function*);
- b. Pada area Penataan dan penguatan ketatalaksanaan adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- c. Pada area penataan peraturan perundang-undangan adalah regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
- d. Pada area penataan sumber daya aparatur adalah sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- e. Pada area penguatan pengawasan adalah peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah;
- f. Pada area penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah;
- g. Pada area peningkatan pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik serta pelayanan birokrasi yang makin murah, cepat, mudah dan baik;
- h. Pada area perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah terbangunnya pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan.



D. Rencana Program, Kegiatan, dan Outcome yang Diharapkan dari Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna

Program-program berorientasi pada hasil (*outcomes oriented programe*), baik pada tingkat makro maupun mikro sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut ini:

Rencana Porogram dan Hasil yang diharapkan Dari Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna

No.	Isu Strategis	Program	Hasil Yang Diharapkan
1	2	3	4
1.	Organisasi	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur	Organisasi yang tepa fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>), sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.
2.	Tatalaksana	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur	Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
3.	Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan kapasitas hukum. - Program peningkatan produk hukum daerah - Program peningkatan keselarasan implementasi kebijakan perekonomian daerah. 	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kundusif.



No.	Isu Strategis	Program	Hasil Yang Diharapkan
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan sistem perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan desa dan aset desa. - Program perencanaan anggaran dan kas daerah. - Program pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi. - Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 	
4.	Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. - Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur. - Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - Program perencanaan anggaran dan kas daerah. 	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
5.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. 	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.



No.	Isu Strategis	Program	Hasil Yang Diharapkan
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Program peningkatan penyelesaian hasil pengawasan 	
6.	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur - Program peningkatan efektivitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Otda - Program perencanaan anggaran dan kas daerah - Program penataan pengelolaan aset daerah - Program pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi - Program pertanggung jawaban keuangan daerah 	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.



No.	Isu Strategis	Program	Hasil Yang Diharapkan
1	2	3	4
7.	Pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan jaringan komunikasi informasi dan media massa - Program pengelolaan opini aspirasi publik dan hubungan media masa - Program penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan perizinan satu pintu - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Program penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan integritas - Program peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang dan jasa - Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur - Program peningkatan dan pengembangan pelayanan kehumasan - Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.



No.	Isu Strategis	Program	Hasil Yang Diharapkan
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS - Program Peningkatan Efektifitas Penelitian dan Pengembangan - Program peningkatan kesempatan kerja - Program pembinaan, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi - Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja - Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan - Program penataan administrasi kependudukan - Program pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pembangunan desa - Program pelayanan kontrasepsi - Program pengembangan industri kecil dan menengah. 	



No.	Isu Strategis	Program	Hasil Yang Diharapkan
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya - Program koordinasi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat 	
8.	Pola pikir (<i>mind set</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur - Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Kompetensi Teknis 	Birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi.

E. Rencana Aksi dan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna

Berdasarkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna 2019-2021, sudah barang tentu masih terdapat upaya-upaya yang belum optimal dilaksanakan. Oleh karena itu periode selanjutnya pada Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Muna 2019-2021, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat melanjutkan dan penguatan terhadap program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.

Adapun program dalam rangka untuk mencapai hasil yang diharapkan pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019-2021 adalah sebagai berikut:



**PROGRAM DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019-2021**

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Organisasi	Terwujudnya kelembagaan OPD yang mampu membantu proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai kebutuhan daerah secara efektif dan efisien.				
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur					
	a. Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100% 40.930.000	100% 224.000.000	100% 235.200.000	Bag. Ortala
	b. Evaluasi Anjab dan ABK SKPD	Jumlah OPD yang menyusun Anjab dan ABK sesuai standar penyusunan	35 OPD 33.785.000	35 OPD 47.926.000	35 OPD 50.322.000	Bag. Ortala



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Aplikasi E-Anjab	Jumlah Aplikasi E-Anjab	1 Paket 102.700.000	-	-	Bag. Ortala
2.	Tata Laksana					
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur					
	Evaluasi SOP SKPD	Jumlah OPD yang menyusun SOP sesuai standar penyusunan	35 OPD 38.405.000	35 OPD 28.941.000	35 OPD 30.388.000	Bag. Ortala
3.	Peraturan Perundang-Undangan					
	1. Program peningkatan kapasitas hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100% 529.280.000	100% 552.187.000	100% 579.798.000	Bag. Hukum
	a. Bantuan Hukum dan Penyelesaian Kasus	Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Pemda	100% 68.700.000	100% 197.954.000	100% 207.852.000	Bag. Hukum
	b. Sosialisasi Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah	100% 57.740.000	100% 125.024.000	100% 131.275.000	Bag. Hukum



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati	Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati	100% 335.940.000	100% 104.186.000	100% 109.396.000	Bag. Hukum
	d. Penyuluhan Hukum Terpadu	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terpadu	100% 35.400.000	100% 104.186.000	100% 109.396.000	Bag. Hukum
	e. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	100% 31.500.000	100% 20.837.000	100% 21.879.000	Bag. Hukum
	2. Program peningkatan produk hukum daerah	Persentase Perda yang ditetapkan terhadap Rancangan Program Legislasi tahunan yang disepakati	470.000	517.000	568.700	Sekretariat DPRD
		Persentase Raperda yang di Perda kan	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	3. Program peningkatan keselarasan implementasi kebijakan perekonomian daerah	Persentase kebijakan Pemda yang selaras dengan kebijakan teknis OPD bidang ekonomi	100% 782.910.000	100% 658.988.000	100% 691.940.000	Bag. Perekonomian dan SDA
	a. Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	100% 142.636.000	100% 79.598.000	100% 83.578.000	Bag. Perekonomian dan SDA
	b. Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	100% 95.787.500	100% 104.186.000	100% 109.396.000	Bag. Perekonomian dan SDA
	c. Pameran Pembangunan HUT Sultra	Jumlah UMKM yang di ikut sertakan dalam pameran produk unggulan UMKM	5 UMKM 458.466.500	5 UMKM 368.414.000	5 UMKM 386.835.000	Bag. Perekonomian dan SDA



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	d. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	100% 42.570.000	100% 57.302.000	100% 60.168.000	Bag. Perekonomian dan SDA
	e. Koordinasi dan Pendataan Potensi Investasi dan Produk Unggulan Ekonomi Daerah	Jumlah Data Potensi Investasi dan Produk Unggulan Ekonomi Daerah	1 Dokumen 43.450.000	1 Dokumen 49.488.000	1 Dokumen 51.963.000	Bag. Perekonomian dan SDA
	4. Program peningkatan keselarasan implementasi urusan kemasyarakatan	Persentase kebijakan Pemda yang selaras dengan kebijakan teknis OPD bidang kemasyarakatan	100% 158.030.500	100% 176.422.000	100% 202.884.000	Bag. Kemasyara- katan
	a. Pembinaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan administrasi dan pelaporan data kependudukan	100% 44.725.500	100% 42.585.000	100% 48.972.000	Bag. Kemasya- rakatan



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Pembinaan/ Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian kantrantib- mas dan Penanggulangan Bencana Alam	100 Orang 51.150.000	100 Orang 79.086.000	100 Orang 90.948.000	Bag. Kemasyarakata n
	c. Koordinasi/Pembinaa n Trantibmas dan Kebencanaan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi/Pembinaan Trantibmas dan Kebencanaan	100% 51.575.000	100% 47.451.000	100% 54.569.000	Bag. Kemasyara- katan
	d. Penyusunan Laporan Pengendalian Bidang Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Pengendalian Bidang Kemasyarakatan	1 Laporan 10.580.000	1 Laporan 7.300.000	1 Laporan 8.395.000	Bag. Kemasyara- katan
5.	Program peningkatan sistem perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Persentase peningkatan sistem perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	100% 59.200.000	100%	100%	DPMD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	a. Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa Tentang PADesa		18.500.000			DPMD
	b. Pembinaan dan Penyusunan PERDES Tentang Keuangan Desa		13.000.000			DPMD
	6. Program perencanaan anggaran dan kas daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran dan kas daerah yang disusun tepat waktu.				BKAD
	a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah buku rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang APBD Tahun Anggaran 2020	2 Buku 443.000.000	2 Buku 703.395.000	2 Buku 738.564.750	BKAD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD TA 2019	Jumlah buku Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	3 Buku 518.000.000	3 Buku 411.232.500	3 Buku 431.794.125	BKAD
	c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Jumlah buku pedoman Pelaksanaan APBD yang disediakan	1 Buku 101.000.000	1 Buku 93.712.500	1 Buku 98.398.125	BKAD
	d. Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang dihasilkan	2 Buku 162.000.000	2 Buku 137.812.500	2 Buku 144.703.125	BKAD
	7. Program pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi	Persenase dikelolanya adminitrasi dan laporan keuangan yang tertib dan tepat waktu				BKAD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018	3 Dokumen 305.000.000	3 Dokumen 275.625.000	3 Dokumen 289.406.250	BKAD
	8. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					
	a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Pimpinan dan Anggota yang mengikuti pelatihan Bimbingan teknis	100% 1.548.000.000	100% 1.727.000.00 0	100% 1.899.700.00 0	Sekretariat DPRD
	b. Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD	Persentase Jumlah Raperda yang yang diperdakan / Jumlah kebutuhan Raperda yang diperdakan	38,46% 160.000.000	40% 320.000.000	43,75% 352.000.000	Sekretariat DPRD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase jumlah Koordinasi dan evaluasi penyusunan raperda	100% 60.000.000	100% 66.000.000	100% 72.600.000	Sekretariat DPRD
	d. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Persentase rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	100% 120.000.000	100% 132.000.000	100% 145.200.000	Sekretariat DPRD
4.	Sumber Daya Manusia Aparatur					
	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang tidak disiplin yang terkena sanksi (<i>punishment</i>)	100% 1.618.550.000	100% 1.815.000.00 0	100% 1.930.000.00 0	BKPSDM
		Persentase penempatan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.	100%	100%	100%	BKPSDM
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.	100%	100%	100%	BKPSDM



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase pejabat yang memiliki sertifikat Diklat PIM (II, III, IV).	100%	100%	100%	BKPSDM
		Persentase SKPD yang mengirim/melaporkan data kepegawaian	100%	100%	100%	BKPSDM
	a. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Persentase PNS yang mengalami kenaikan pangkat otomatis	95% 165.000.000	100% 150.000.000	100% 160.000.000	BKPSDM
	b. Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Persentase penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	100% 70.000.000	100% 75.000.000	100% 80.000.000	BKPSDM
	c. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Persentase PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar	95% 223.250.000	100% 485.000.000	100% 500.000.000	BKPSDM



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	d. Pembinaan Karier PNS	Persentase jabatan ASN yang diseleksi dan dilakukan	95% 116.400.000	100% 80.000.000	100% 85.000.000	BKPSDM
	e. Seleksi Jabatan Struktural	Persentase jabatan ASN yang terisi melalui seleksi terbuka atau job fit	95% 780.000.000	100% 800.000.000	100% 850.000.000	BKPSDM
	f. Pengelolaan Data Kepegawaian Online	Persentase laporan pemutakhiran data PNS melalui SAPK Online	95% 61.200.000	100% 30.000.000	100% 35.000.000	BKPSDM
	g. Penyelenggaraan Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah	Persentase PNS yang mengikuti ujian dinas, dan Ujian Penyesuaian ijazah	95% 40.000.000	100% 40.000.000	100% 50.000.000	BKPSDM
	h. Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	Persentase PNS yang mengusul pensiun	95% 70.000.000	100% 70.000.000	100% 80.000.000	BKPSDM
	i. Penyusunan Formasi dan Bazetting Pegawai	Persentase Penyelesaian dokumen e-formasi dan Data Base Pegawai	70% 30.700.000	80% 50.000.000	90% 50.000.000	BKPSDM



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	j. Penempatan PNS	Persentase Pendistribusian PNS sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensinya	65% 62.000.000	70% 35.000.000	75% 40.000.000	BKPSDM
	2. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan Tatalaksana Aparatur					Bag. Ortala
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan dan Kompetensi Teknis	1 Dokumen 56.196.000	-	-	Bag. Ortala
	3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase kelembagaan perencanaan OPD yang mengikuti Diklat/bimtek				BAPPEDA
		Persentase kelembagaan perencanaan kecamatan/kelurahan/desa yang mengikuti Diklat/bimtek				BAPPEDA



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	4. Program perencanaan anggaran dan kas daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran dan kas daerah yang disusun tepat waktu				BKAD
	Konsinyering/ Workshop Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Keikutsertaan OPD dalam pelaksanaan Konsinyering/ Workshop Penyusunan Laporan Keuangan	100% 435.000.000	-	-	BKAD
5.	Pengawasan	Opini BPK	WTP 1.077.830.900	WTP 3.616.565.064	WTP 4.096.069.02	Inspektorat
	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi oleh Inspektorat dan BPK.	95% 1.077.830.900	100% 3.616.565.06 2	100% 4.096.069.02 8	Inspektorat



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obrik yang dilakukan Pengawasan Secara Berkala	80 Obrik 80 LHP 502.000.000	80 Obrik 80 LHP 1.375.598.81 6	80 Obrik 80 LHP 1.581.881.13 8	Inspektorat
	b. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Kasus Pengaduan dan Obrik yang berbasis Resiko	40 Pengaduan 91.000.000	40 Pengaduan 129.363.000	40 Pengaduan 129.363.000	Inspektorat
	c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan keuangan pemerintah daerah	1 LHR 43.985.000	1 LHR 65.000.000	1 LHR 70.000.000	Inspektorat
	d. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Obrik yang Dimonitoring	80 Obrik 269.250.000	80 Obrik 637.127.997	80 Obrik 732.697.196	Inspektorat
	e. Evaluasi Berkala Temuan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan rapat Pemutakhiran Data Temuan Hasil Pemeriksaan	18 Rapat 90.495.900	20 Rapat 152.064.687	20 Rapat 201.105.548	Inspektorat



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	f. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penanganan Saber Pungli	5 Kasus 81.100.000	5 Kasus 100.000.000	4 Kasus 100.000.000	Inspektorat
	2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase aparat Pengawas Bersertifikasi Fungsional dan Teknis Substansi	100% 111.400.000	100% 578.705.281	100% 640.511.073	Inspektorat
	a. Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparat Pengawas yang Mengikuti Diklat Fungsional/Teknis Substansi	15 Auditor 15 P2UPD 1 Struktural 90.000.000	15 Auditor 15 P2UPD 3 Struktural 500.000.000	20 Auditor 20 P2UPD 550.000.000	Inspektorat
	b. Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Penyusunan PKPT	Jumlah Pelaksanaan rapat Pengawasan	3 Rapat PKPT 21.400.000	3 Rapat PKPT 78.705.281	3 Rapat PKPT 90.511.073	Inspektorat
	3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase kesempurnaan sistem pengawasan	100% 200.000	100% 150.000	100% 200.000	Inspektorat



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	4. Program peningkatan penyelesaian hasil pengawasan	Persentase peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal secara optimal	100% 706.089	100% 789.192	100% 933.802	Inspektorat
6.	Akuntabilitas	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	BB	BB	A	Ortala/OPD
	1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur	Presentase OPD yang memperoleh nilai LAKIP Minimal B.	80% 582.321.000	90% 409.221.000	100% 429.682.000	Bag. Ortala
	a. Penyusunan SAKIP	Jumlah Dokumen Sakip	1 Dokumen 244.275.000	1 Dokumen 101.061.000	1 Dokumen 106.114.000	Bag. Ortala
	b. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen 43.430.000	-	-	Bag. Ortala



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	2. Progam peningkatan efektivitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Otda	Presentase SKPD kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan dengan status baik.	100% 232.000.000	100% 714.204.000	100% 821.333.000	Bag. Pemerintahan
	a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	1 Dokumen 79.000.000	1 Dokumen 371.094.000	1 Dokumen 426.758.000	Bag. Pemerintahan
	b. Inventarisasi Rupa Bumi	Jumlah Dokumen nama Rupa Bumi Kab. Muna	1 Dokumen 71.400.000	1 Dokumen 138.704.000	1 Dokumen 159.509.000	Bag. Pemerintahan
	c. Koordinasi dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan	100% 59.000.000	100% 88.819.000	100% 102.142.000	Bag. Pemerintahan



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	d. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	100% 22.600.000	100% 115.587.000	100% 132.924.000	Bag. Pemerintahan
	3. Program perencanaan anggaran dan kas daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran dan kas daerah yang disusun tepat waktu	100% 2.525.500.000	100% 2.137.931.25 0	100% 2.244.827.81 3	BKAD
	a. Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah buku analisa standar biaya yang dihasilkan	1 Buku 46.500.000	1 Buku 51.266.250	1 Buku 53.829.563	BKAD
	b. Analisis dan Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung	Jumlah dokumen anggaran belanja tidak langsung yang tersedia	2 Dokumen 49.000.000	2 Dokumen 51.450.000	2 Dokumen 54.022.500	BKAD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya data pengelolaan keuangan daerah	100% 400.000.000	100% 385.875.000	100% 405.168.750	BKAD
	d. Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen belanja hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi	300 Dokumen 33.000.000	300 Dokumen 36.382.500	300 Dokumen 38.201.625	BKAD
	e. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan	450 Lembar 50.000.000	450 Lembar 55.125.000	450 Lembar 57.881.250	BKAD
	f. Pengelolaan Keuangan Kas Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan	2000 Lembar 90.000.000	2000 Lembar 77.175.000	2000 Lembar 81.033.750	BKAD
	g. Penataan Pajak Pihak Ketiga	Jumlah dokumen pajak pihak ketiga yang dikelola	1500 Lembar 122.000.000	1500 Lembar 100.327.500	1500 Lembar 105.343.875	BKAD
	h. Evaluasi dan Rekonsiliasi Kas	Jumlah laporan evaluasi dan rekonsiliasi kas	2 Laporan 238.000.000	2 Laporan 171.990.000	2 Laporan 180.589.500	BKAD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	4. Program penataan pengelolaan aset daerah	Persentase aset/barang milik daerah yang dikelola dengan baik	100% 1.683.000.000	100% 832.387.500	100% 874.006.875	BKAD
	a. Manajemen Aset Barang Daerah	Persentase Pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien	100% 458.000.000	100% 386.977.500	100% 406.326.375	BKAD
	b. Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebutuhan dan pengadaan barang milik daerah	1 RKBU 209.000.000	1 RKBU 71.662.500	1 RKBU 75.245.625	BKAD
	c. Penghapusan dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	Dokumen penghapusan dan perubahan status hukum barang milik daerah	2 Buku 246.000.000	2 Buku 169.785.000	2 Buku 178.274.250	BKAD
	d. Penataan dan Penertiban Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penataan dan penertiban barang milik daerah	2 Laporan 108.000.000	2 Laporan 66.150.000	2 Laporan 69.457.500	BKAD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	e. Sensus Barang Milik Daerah	Persentase kelengkapan barang milik daerah	100% 500.000.000	-	-	BKAD
	5. Program pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi	Persentase dikelolanya administrasi dan laporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100% 1.261.500.000	100% 943.740.000	100% 990.927.002	BKAD
	a. Evaluasi Pelaporan dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran	Jumlah laporan OPD yang dievaluasi	696 Laporan 88.000.000	696 Laporan 61.188.750	696 Laporan 64.248.188	BKAD
	b. Laporan Dana Transfer Daerah	Jumlah laporan dana transfer daerah	4 Laporan 160.000.000	4 Laporan 111.352.500	4 Laporan 116.920.125	BKAD
	c. Verifikasi dan Pelaporan Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan	Jumlah dokumen pelaporan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan yang diverifikasi	4 Dokumen 60.000.000	4 Dokumen 66.150.000	4 Dokumen 69.457.500	BKAD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	d. Verifikasi dan Pembinaan Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah yang diverifikasi	696 Laporan 80.000.000	696 Laporan 50.163.750	696 Laporan 52.671.938	BKAD
	e. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Daerah	696 Laporan 51.000.000	696 Laporan 41.343.750	696 Laporan 43.410.938	BKAD
	f. Pengelolaan Gaji ASN Kabupaten	Jumlah laporan gaji ASN Kabupaten	684 Laporan 121.500.000	684 Laporan 89.853.750	684 Laporan 94.346.438	BKAD
	g. Rekonsiliasi dan Pelaporan Gaji ASN	Jumlah dokumen pelaporan gaji ASN	1 Dokumen 75.000.000	1 Dokumen 66.150.000	1 Dokumen 69.457.500	BKAD
	h. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen 50.000.000	1 Dokumen 55.125.000	1 Dokumen 57.881.250	BKAD
	i. Sinkronisasi SPJ Fungsional	Dokumen sinkronisasi SPJ Fungsional	60 Dokumen 50.000.000	60 Dokumen 55.125.000	60 Dokumen 57.881.250	BKAD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	j. Pengelolaan Utang Piutang Daerah	Jumlah Dokumen Utang Piutang Daerah	4 Dokumen 181.000.000	4 Dokumen 27.562.500	4 Dokumen 28.940.625	BKAD
	k. Updating dan Penyusunan Neraca	Jumlah dokumen updating dan penyusunan neraca	1 Dokumen 40.000.000	1 Dokumen 44.100.000	1 Dokumen 46.305.000	BKAD
	6. Program pertanggung jawaban keuangan daerah	Persentase pelaporan dan pertang jawaban keuangan daerah	457.537	480.414	480.414	BKAD
7.	Pelayanan Publik					
	1. Program pengembangan jaringan komunikasi informasi dan media massa	Persentase pengembangan jaringan komunikasi, informasi dan media massa	100% 2.806.770.400			Dinas Kominfo
	a. Pengembangan SP4N LAPOR		288.500.000			Dinas Kominfo
	b. Penyusunan <i>Masterplan Smart City</i>	Dokumen Master Plan	1 Dokumen 350.000.000	-	-	Dinas Kominfo



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		509.100.000			Dinas Kominfo
	d. Penyediaan Layanan Informasi Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi		684.900.000			Dinas Kominfo
	e. Pengelolaan dan Pengembangan Website Pemerintah Kab. Muna		974.270.400			Dinas Kominfo
	2. Program pengelolaan opini aspirasi publik dan hubungan media masa	Keberasaan publikasi data statistik daerah secara elektronik melalui webside Pemda	300.000	315.000	330.000	Dinas Kominfo



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	3. Program penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan perizinan satu pintu	Persentase perizinan yang diselesaikan	100% 132.000.000			DPMPTSP
	a. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan I, II, III		39.000.000			DPMPTSP
	b. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		93.000.000			DPMPTSP
	4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tersedianya Website	100% 111.750.000			DPMPTSP
	a. Pengendalian Sistem Informasi Investasi Penanaman Modal Daerah		25.200.000			DPMPTSP



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Pendataan dan Penyebarluasan Informasi IMB dan Izin Usaha		30.700.000			DPMPTSP
	c. Penyusunan Profil Potensi Unggulan Daerah		55.850.000			DPMPTSP
5.	Program penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan integritas	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100% 376.242	100% 489.363	100% 529.363	Inspektorat
6.	Program peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang dan jasa	- Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	78% 421.616.000	80% 570.000	82% 570.000	Bag. ULP
		- Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	78%	80%	82%	Bag. ULP



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		- Persentase belanja modal dan barang/jasa yang ditender melalui ULP	%	%	%	Bag. ULP
	a. Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP dan Distribusi Dokumen RPP dan Retrival Dokumen Kontrak Penyedia	Persentase pelayanan Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP yang tepat waktu	100% 29.300.000	100% 79.598.000	100% 83.578.000	Bag. ULP
	b. Pengelolaan dan Manajemen Pengadaan Barang Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	100% 290.338.000	100% 416.745.000	100% 437.582.000	Bag. ULP
	c. Monitoring Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan Monitoring Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	100% 16.218.000	100% 23.129.000	100% 24.286.000	Bag. ULP



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	d. Koordinasi dan Pelatihan Unit Kerja Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan koordinasi dan Pelatihan Unit Kerja Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	100% 63.000.000	100% 96.060.000	100% 100.863.000	Bag. ULP
	e. Pemilihan Penyedia Barang Jasa Melalui e-tendering	Persentase belanja modal dan barang/jasa yang ditender melalui ULP	100% 22.760.000	100% 78.140.000	100% 82.047.000	Bag. ULP
	7. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur					Bag. Ortala
	Pelaporan SPM	Jumlah Laporan SPM	1 Laporan 22.600.000	1 Laporan 7.293.000	1 Laporan 7.658.000	Bag. Ortala
	8. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan kehumasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100% 485.465.000	100% 823.072.000	100% 864.225.000	Bag. Humas



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	a. Kegiatan Efektifitas Pelaksanaan Keprotokoleran	Persentase Pelaksanaan keprotoleran yang efektif	100% 282.990.000	100% 125.024.000	100% 131.275.000	Bag. Humas
	b. Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	100% 95.650.000	100% 520.931.000	100% 546.978.000	Bag. Humas
	c. Peliputan Acara Pemerintahan Daerah, Pengadaan Buku Sambutan Bupati dan Jurnal	Persentase Pelaksanaan Peliputan Acara Pemerintahan Daerah, Pengadaan Buku Sambutan Bupati dan Jurnal	100% 106.825.000	100% 177.117.000	100% 185.972.000	Bag. Humas
9.	Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100% 3.541.650.000	100% 4.063.835.00	100% 4.470.417.00	Sekretariat DPRD
	a. Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses	3 Kali 1.601.350.000	3 Kali 1.761.485.00	3 Kali 1.937.634.00	Sekretariat DPRD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Persentase jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	100% 52.300.000	100% 57.530.000	100% 63.283.000	Sekretariat DPRD
	10. Program peningkatan penanggulangan nar-koba dan HIV/AIDS	Kab. Muna bebas dari Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	150.000	150.000	150.000	Bag. Kesra
	11. Program Peningkatan Efektifitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	90% 2.708.000.000	95% 3.991.050.00 0	100% 4.190.602.50 0	Badan Litbang
	a. Penelitian/Kajian/St udi/Analisis Bidang Pembangunan, Teknologi dan Inovasi	Jumlah Judul Penelitian/ kajian studi/analisis bidang pembangunan teknologi dan inovasi	9 Judul 1.126.500.000	9 Judul 1.786.050.00 0	9 Judul 1.875.352.50 0	Badan Litbang
	b. Penelitian/Kajian/ Studi/Analisis Bid-ang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Judul Penelitian/ kajian studi/analisis bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan	8 Judul 1.581.500.000	8 Judul 2.205.000.00 0	8 Judul 2.315.250.00 0	Badan Litbang



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	12. Program peningkatan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang diperkerjakan	62% 107.500.000	62% 430.000.000	65% 430.000.000	Dinas Transnaker
	a. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online	Jumlah Informasi Bursa Kerja/Lowongan Kerja yang disebarluaskan melalui BKOL	20 Loker 7.500.000	25 Loker 30.000.000	25 Loker 30.000.000	Dinas Transnaker
	b. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai	120 Orang 100.000.000	120 Orang 400.000.000	120 Orang 400.000.000	Dinas Transnaker
	13. Program pembinaan, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mendapat pembinaan	100% 15.700.000	100% 25.000.000	100% 25.000.000	Dinas Transnaker
	Koordinasi Lintas Sektor	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	5 Kali 15.700.000	6 Kali 25.000.000	6 Kali 25.000.000	Dinas Transnaker
	14. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80% 620.000	80% 40.380.000	85% 580.000	Dinas Transnaker



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	15. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan.	30% 439.500.000	30% 308.000.000	30% 338.800.000	Dinas PU
	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah konflik yang diselesaikan	1 Kasus 439.500.000	1 Kasus 308.000.000	1 Kasus 338.800.000	Dinas PU
	16. Program penataan administrasi kependudukan	- Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	83% 1.402.245.000	90% 864.023.738	100% 907.224.924	Dinas Dukcapil
		- Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	83%	90%	100%	Dinas Dukcapil
	a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen 138.000.000	1 Dokumen 171.990.000	1 Dokumen 180.589.500	Dinas Dukcapil
	b. Pelayanan administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan keliling Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100% 259.245.000	100% 172.535.738	100% 181.162.524	Dinas Dukcapil



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Pelaksanaan koordinasi kebijakan kependudukan	6 Kali 420.000.000	6 Kali 125.685.000	6 Kali 131.969.250	Dinas Dukcapil
	d. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Laporan pelayanan prima bagi masyarakat	6 Dokumen 85.000.000	7 Dokumen 166.698.000	8 Dokumen 175.032.900	Dinas Dukcapil
	e. Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Dokumen kebijakan kependudukan	6 Dokumen 440.000.000	6 Dokumen 143.325.000	6 Dokumen 150.491.250	Dinas Dukcapil
	f. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	6 Kali 60.000.000	6 Kali 83.790.000	6 Kali 87.979.500	Dinas Dukcapil
17.	Program pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pembangunan desa	Persentase pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pembangunan desa	100% 2.482.475.000	100%	100%	DPMD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	a. Lomba Desa/Kel.		50.000.000			DPMD
	b. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional		45.000.000			DPMD
	c. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga		2.263.500.000			DPMD
	d. Pembinaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya		15.400.000			DPMD
	e. Ekspose potensi Desa		30.000.000			DPMD
	f. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan		78.575.000			DPMD



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	18. Program pelayanan konstrasepsi	- Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	100% 6.103.791.000	100% 2.085.709.50 0	100% 2.189.994.97 6	DKKB
		- Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenu-hi permintaan masyarakat.	1.024.600	1.075.930	1.129.622	DKKB
	a. Penyediaan Obat Side Efek	Jumlah Penyediaan obat Side Efek	400 Dos 20.000.000	450 Dos 22.050.000	4500 Dos 23.152.500	DKKB
	b. Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi	Jumlah Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana	1 Unit 2.050.500.000	1 Unit 820.260.000	1 Unit 861.273.000	DKKB
	c. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB	Jumlah pelaksanaan Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB	1 Kali 1.016.400.000	1 Kali 751.905.000	1 Kali 789.500.250	DKKB



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	d. Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB	Jumlah pelaksanaan Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB	1 Kali 392.700.000	1 Kali 92.951.775	1 Kali 97.599.364	DKKB
	e. Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB	Jumlah Kelompok PIK-KRR yang dibina	8 Kelompok 392.700.000	9 Kelompok 109.147.500	10 Kelompok 114.604.875	DKKB
	f. Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Tribina	Tenaga Pendamping Tribina yang dibina	2 Petugas 508.200.000	2 Petugas 12.039.300	2 Petugas 12.641.265	DKKB
	g. Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	Jumlah pelaksanaan Penggarapan Advokasi dan KIE Program KKBPK	1 Kali 636.091.000	1 Kali 99.776.250	1 Kali 104.765.063	DKKB
	h. Komunikasi Informasi dan Edukasi PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	Jumlah Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Bina Balita	1 Unit 1.087.200.000	1 Unit 177.579.675	1 Unit 186.458.659	DKKB



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	19. Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Pelaku IKM yang berkembang/ meningkat usahanya/ difasilitasi	100% 47.220.000	100% 41.818.000	100% 41.818.000	Dinas Perdagin
	a. Penguatan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang terbina	4 IKM 15.875.000	4 IKM 14.393.000	5 IKM 14.393.000	Dinas Perdagin
	b. Pengembangan Sistem Informasi Industri dan Perdagangan	Jumlah Usaha Dagang dan Industri yang terdata	625 Usaha 31.345.000	700 Usaha 27.425.000	700 Usaha 27.425.000	Dinas Perdagin
	20. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Persentase desa-desa yang mendapatkan bantuan program Pamsimas	90% 895.860.000	100%	100%	BAPPEDA
	a. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.	Laporan pengendalian Program Pengendalian Kemiskinan Daerah	1 Dokumen 80.300.000	1 Dokumen 67.109.000	1 Dokumen 70.465.000	BAPPEDA



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan pengendalian Pengembangan SDM	1 Dokumen 68.010.000	1 Dokumen 36.846.000	1 Dokumen 38.688.000	BAPPEDA
	c. Koordinasi Pokja Pengembangan Sosial Budaya	Laporan pengendalian kinerja Pokja Pengembangan Sosial Budaya	1 Dokumen 47.550.000	1 Dokumen 35.324.000	1 Dokumen 37.090.000	BAPPEDA
	d. Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP)	Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP)	1 Dokumen 700.000.000	-	-	BAPPEDA
	21. Program koordinasi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat	- Persentase desa-desa yang mendapatkan bantuan program Pamsimas	90% 153.017	100% 160.667	100% 168.701	BAPPEDA
		- Persentase kelurahan yang mendapatkan bantuan program kotaku	90% 153.017	100% 160.667	100% 168.701	BAPPEDA



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target			OPD Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pola Pikir / Manajemen Perubahan					
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur					
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan dan Kompetensi Teknis	1 Dokumen 56.196.000	-	-	



F. Quick Wins

Program *quick wins* dilakukan dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *oucome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Quick Wins Reformasi Birokrasi Kabupaten Muna Tahun 2019

No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Organisasi	1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur	a. Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100%	40.930.000					Bag. Ortala
			b. Evaluasi Anjab dan ABK SKPD	Jumlah OPD yang menyusun Anjab dan ABK sesuai standar penyusunan	35 OPD	33.785.000					Bag. Ortala
			c. Aplikasi E-Anjab	Jumlah Aplikasi E-Anjab	1 Pkt	102.700.000					Bag. Ortala
2.	Tata Laksana	2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur	Evaluasi SOP SKPD	Jumlah OPD yang menyusun SOP sesuai standar penyusunan	35 OPD	38.405.000					Bag. Ortala
3.	Peraturan Perundang-Undangan	3. Program peningkatan kapasitas hukum	a. Bantuan Hukum dan Penyelesaian Kasus	Persentase Penyelesaian Kasus Hukum Pemda	100%	68.700.000					Bag. Hukum
			b. Sosialisasi Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah	100%	57.740.000					Bag. Hukum
			c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati	Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati	100%	335.940.000					Bag. Hukum



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			d. Penyuluhan Hukum Terpadu	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terpadu	100%	35.400.000					Bag. Hukum
			e. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	100%	31.500.000					Bag. Hukum
		4. Program peningkatan produk hukum daerah									Sekretariat DPRD
		5. Program peningkatan keselarasan implementasi kebijakan perekonomian daerah	a. Koordinasi dan Pengan-dalian Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengan-dalian Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	100%	142.636.000					Bag. Kemasya-rakatan
			b. Pembinaan/ Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian kantrantibmas dan Penanggulangan Bencana Alam	100 Orang	51.150.000					Bag. Kemasya-rakatan
			c. Koordinasi/ Pembinaan Trantibmas dan Kebencanaan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi/Pembinaan Trantibmas dan Kebencanaan	100%	51.575.000					Bag. Kemasya-rakatan
			d. Penyusunan Laporan Pengendalian Bidang Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Pengendalian Bidang Kemasyarakatan	1 Lap.	10.580.000					Bag. Kemasya-rakatan



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6. Program peningkatan sistem perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	a. Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa Tentang PADesa	Jumlah Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa Tentang PADesa	5 Desa	18.500.000					DPMD
			b. Pembinaan dan Penyusunan PERDES Tentang Keuangan Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan Penyusunan PERDES Tentang Keuangan Desa	125 Desa	13.000.000					DPMD
		7. Program perencanaan anggaran dan kas daerah	a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang APBD	Jumlah buku rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang APBD	2 Buku	443.000.000					BKAD
			b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	Jumlah buku rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	3 Buku	518.000.000					BKAD
			c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Jumlah buku pedoman Pelaksanaan APBD yang disediakan	1 Buku	101.000.000					BKAD
			d. Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang dihasilkan	2 Buku	162.000.000					BKAD
		8. Program pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Peraturan KDH tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok.	305.000.000					BKAD
		9. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan	a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Pimpinan dan Anggota yang mengikuti pelatihan Bimbingan teknis	100%	1.548.000.000					Sekretariat DPRD



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rakyat Daerah	b. Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD	Persentase Jumlah Raperda yang diperdakan/ Jumlah kebutuhan Raperda yang diperdakan	38,46%	160.000.000					Sekretariat DPRD
			c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase jumlah Koordinasi dan evaluasi penyusunan raperda	100%	60.000.000					Sekretariat DPRD
			d. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Persentase rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	100%	120.000.000					Sekretariat DPRD
4.	Sumber Daya Manusia Aparatur	10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	a. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Persentase PNS yang mengalami kenaikan pangkat otomatis	95%	165.000.000					BKPSDM
			b. Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Persentase penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	100%	70.000.000					BKPSDM
			c. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Persentase PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar	95%	223.250.000					BKPSDM
			d. Pembinaan Karier PNS	Persentase jabatan ASN yang diseleksi dan dilakukan	95%	116.400.000					BKPSDM
			e. Seleksi Jabatan Struktural	Persentase jabatan ASN yang terisi melalui seleksi terbuka atau <i>job fit</i>	95%	780.000.000					BKPSDM
			f. Pengelolaan Data Kepegawaian Online	Persentase laporan pemutakhiran data PNS melalui SAPK Online	95%	61.200.000					BKPSDM



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			g. Penyelenggaraan Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah	Persentase PNS yang mengikuti ujian dinas, dan Ujian Penyesuaian ijazah	95%	40.000.000					BKPSDM
			h. Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	Persentase PNS yang mengusul pensiun	95%	70.000.000					BKPSDM
			i. Penyusunan Formasi dan Bazetting Pegawai	Persentase Penyelesaian dokumen e-formasi dan Data Base Pegawai	70%	30.700.000					BKPSDM
			j. Penempatan PNS	Persentase Pendistribusian PNS sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensinya	65%	62.000.000					BKPSDM
			k. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan dan Kompetensi Teknis	1 Dokumen	56.196.000					Bag. Ortala
		11. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah									BAPPEDA
		12. Program perencanaan anggaran dan kas daerah	Konsinyering/ Workshop Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Keikutsertaan OPD dalam pelaksanaan Konsinyering/ Workshop Penyusunan Laporan Keuangan	100%	435.000.000					BKAD



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Pengawasan	13. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obrik yang dilakukan Pengawasan Secara Berkala	80 Obrik 80 LHP	502.000.000					Inspektorat
			b. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Kasus Pengaduan dan Obrik yang berbasis Resiko	40 Pengaduan	91.000.000					Inspektorat
			c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan keuangan pemerintah daerah	1 LHR	43.985.000					Inspektorat
			d. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Obrik yang Dimonitoring	80 Obrik	269.250.000					Inspektorat
			e. Evaluasi Berkala Temuan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan rapat Pemutakhiran Data Temuan Hasil Pemeriksaan	18 Rapat	90.495.900					Inspektorat
			f. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penanganan Saber Pungli	5 Kasus	81.100.000					Inspektorat
		14. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	a. Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparat Pengawas yang Mengikuti Diklat Fungsional/Teknis Substansi	15 Auditor 15 P2UPD 1 Struktura 1	90.000.000					Inspektorat
			b. Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Penyusunan PKPT	Jumlah Pelaksanaan rapat Pengawasan	3 Rapat PKPT	21.400.000					Inspektorat



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab			
							I	II	III	IV				
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		15. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan										Inspektorat		
		16. Program peningkatan penyelesaian hasil pengawasan										Inspektorat		
6.	Akuntabilitas	17. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur	a. Penyusunan SAKIP	Jumlah Dokumen Sakip	1 Dok.	244.275.000						Bag. Ortala		
			b. Penyusunan Road Map Reformasi Birokasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokasi	1 Dok.	43.430.000							Bag. Ortala	
			c. Reviu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	Jumlah LAKIP OPD yang direviu	35 Lap.	23.750.000							Inspektorat	
		18. Program peningkatan efektivitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Otda	a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	1 Dok.	79.000.000								Bag. Pemerintahan
			b. Inventarisasi Rupa Bumi	Jumlah Dokumen nama Rupa Bumi Kab. Muna	1 Dok.	71.400.000								Bag. Pemerintahan
			c. Koordinasi dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan	100%	59.000.000								Bag. Pemerintahan
			d. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	100%	22.600.000								Bag. Pemerintahan



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		19. Program perencanaan anggaran dan kas daerah	a. Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah buku analisa standar biaya yang dihasilkan	1 Buku	46.500.000					BKAD
			b. Analisis dan Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung	Jumlah dokumen anggaran belanja tidak langsung yang tersedia	2 Dok.	49.000.000					BKAD
			c. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya data pengelolaan keuangan daerah	100%	400.000.000					BKAD
			d. Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen belanja hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi	300 Dok.	33.000.000					BKAD
			e. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan	450 Lbr	50.000.000					BKAD
			f. Pengelolaan Keuangan Kas Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan	2000 Lbr	90.000.000					BKAD
			g. Penataan Pajak Pihak Ketiga	Jumlah dokumen pajak pihak ketiga yang dikelola	1500 Lbr	122.000.000					BKAD
			h. Evaluasi dan Rekonsiliasi Kas	Jumlah laporan evaluasi dan rekonsiliasi kas	2 Lap.	238.000.000					BKAD
		20. Program penataan pengelolaan aset daerah	a. Manajemen Aset Barang Daerah	Persentase Pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien	100%	458.000.000					BKAD
			b. Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebutuhan dan pengadaan barang milik daerah	1 RKBU	209.000.000					BKAD



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			c. Penghapusan dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	Dokumen penghapusan dan perubahan status hukum barang milik daerah	2 Buku	246.000.000					BKAD
			d. Penataan dan Penertiban Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penataan dan penertiban barang milik daerah	2 Lap.	108.000.000					BKAD
			e. Sensus Barang Milik Daerah	Persentase kelengkapan barang milik daerah	100%	500.000.000					BKAD
		21. Program pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi	a. Evaluasi Pelaporan dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran	Jumlah laporan OPD yang dievaluasi	696 Lap.	88.000.000					BKAD
			b. Laporan Dana Transfer Daerah	Jumlah laporan dana transfer daerah	4 Lap.	160.000.000					BKAD
			c. Verifikasi dan Pelaporan Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan	Jumlah dokumen pelaporan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan yang diverifikasi	4 Dok.	60.000.000					BKAD
			d. Verifikasi dan Pembinaan Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah yang diverifikasi	696 Lap.	80.000.000					BKAD
			e. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Daerah	696 Lap.	51.000.000					BKAD
			f. Pengelolaan Gaji ASN Kabupaten	Jumlah laporan gaji ASN Kabupaten	684 Lap.	121.500.000					BKAD
			g. Rekonsiliasi dan Pelaporan Gaji ASN	Jumlah dokumen pelaporan gaji ASN	1 Dok.	75.000.000					BKAD



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			h. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dok.	50.000.000					BKAD
			i. Sinkronisasi SPJ Fungsional	Dokumen sinkronisasi SPJ Fungsional	60 Dok.	50.000.000					BKAD
			j. Pengelolaan Utang Piutang Daerah	Jumlah Dokumen Utang Piutang Daerah	4 Dok.	181.000.000					BKAD
			k. Updating dan Penyusunan Neraca	Jumlah dokumen updating dan penyusunan neraca	1 Dok.	40.000.000					BKAD
		22. Program pertanggung jawaban keuangan daerah									BKAD
7.	Pelayanan publik	23. Program pengembangan jaringan komunikasi informasi dan media massa	a. Pengembangan SP4N LAPOR	Persentase SP4N LAPOR yang dikembangkan	100%	288.500.000					Dinas Kominfo
			b. Penyusunan Masterplan Smart City	Dokumen Master Plan	1 Dok.	350.000.000					Dinas Kominfo
			c. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disebarluaskan	100%	509.100.000					Dinas Kominfo
			d. Penyediaan Layanan Informasi Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase tersedianya Layanan Informasi Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	684.900.000					Dinas Kominfo
			e. Pengelolaan dan Pengembangan Website Pemerintah Kab. Muna	Persentase Website Pemerintah Kab. Muna yang dikelola dan dikembangkan	100%	974.270.400					Dinas Kominfo



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab		
							I	II	III	IV			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		24. Program pengelolaan opini aspirasi publik dan hubungan media masa										Dinas Kominfo	
		25. Program penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan perizinan satu pintu	a. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan I, II, III	Persentase Pelaksanaan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan I, II, III	100%	39.000.000						DPMPTSP	
			b. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%	93.000.000							DPMPTSP
		26. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	a. Pengendalian Sistem Informasi Investasi Penanaman Modal Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Sistem Informasi Investasi Penanaman Modal Daerah	100%	25.200.000						DPMPTSP	
			b. Pendataan dan Penyebarluasan Informasi IMB dan Izin Usaha	Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Penyebarluasan Informasi IMB dan Izin Usaha	100%	30.700.000							DPMPTSP
			c. Penyusunan Profil Potensi Unggulan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Profil Potensi Unggulan Daerah	100%	55.850.000							DPMPTSP
		27. Program penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan integritas										Inspektorat	



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		28. Program peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang dan jasa	a. Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP dan Distribusi Dokumen RPP dan Retrieval Dokumen Kontrak Penyedia	Persentase pelayanan Verifikasi Penerimaan dan Evaluasi RUP yang tepat waktu	100%	29.300.000					Bag. ULP
			b. Pengelolaan dan Manajemen Pengadaan Barang Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	100%	290.338.000					Bag. ULP
			c. Monitoring Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan Monitoring Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	16.218.000					Bag. ULP
			d. Koordinasi dan Pelatihan Unit Kerja Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan koordinasi dan Pelatihan Unit Kerja Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	100%	63.000.000					Bag. ULP
			e. Pemilihan Penyedia Barang Jasa Melalui e-tendering	Persentase belanja modal dan barang/jasa yang ditender melalui ULP	100%	22.760.000					Bag. ULP
		29. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur	Pelaporan SPM	Jumlah Laporan SPM	1 Laporan	22.600.000					Bag. Ortala



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		30. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan kehumasan	a. Kegiatan Efektifitas Pelaksanaan Keprotokoleran	Persentase Pelaksanaan keprotoleran yang efektif	100%	282.990.000					Bag. Humas
			b. Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	100%	95.650.000					Bag. Humas
			c. Peliputan Acara Pemerintahan Daerah, Pengadaan Buku Sambutan Bupati dan Jurnal	Persentase Pelaksanaan Peliputan Acara Pemerintahan Daerah, Pengadaan Buku Sambutan Bupati dan Jurnal	100%	106.825.000					Bag. Humas
		31. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	a. Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses	3 Kali	1.601.350.000					Sekretariat DPRD
			b. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Persentase jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	100%	52.300.000					Sekretariat DPRD
		32. Program peningkatan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS									Bag. Kesra
		33. Program Peningkatan Efektifitas Penelitian dan Pengembangan	a. Penelitian/Kajian/Studi/Analisis Bidang Pembangunan, Teknologi dan Inovasi	Jumlah Judul Penelitian/kajian studi/analisis bidang pembangunan teknologi dan inovasi	9 Judul	1.126.500.000					Badan Litbang
			b. Penelitian/Kajian/Studi/Analisis Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Judul Penelitian/kajian studi/analisis bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan	8 Judul	1.581.500.000					Badan Litbang



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		34. Program peningkatan kesempatan kerja	a. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online	Jumlah Informasi Bursa Kerja/Lowongan Kerja yang disebarluaskan melalui BKOL	20 Loker	7.500.000					Dinas Transnaker
			b. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai	120 Orang	100.000.000					Dinas Transnaker
		35. Program pembinaan, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	Koordinasi Lintas Sektor	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	5 Kali	15.700.000					Dinas Transnaker
		36. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja									Dinas Transnaker
		37. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah konflik yang diselesaikan	1 Kasus	439.500.000					Dinas PU
		38. Program penataan administrasi kependudukan	a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dok.	138.000.000					Dinas Dukcapil
			b. Pelayanan administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan keliling Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	259.245.000					Dinas Dukcapil
			c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Pelaksanaan koordinasi kebijakan kependudukan	6 Kali	420.000.000					Dinas Dukcapil



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			d. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Laporan pelayanan prima bagi masyarakat	6 Dok.	85.000.000					Dinas Dukcapil
			e. Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Dokumen kebijakan kependudukan	6 Dok.	440.000.000					Dinas Dukcapil
			f. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	6 Kali	60.000.000					Dinas Dukcapil
		39. Program pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pembangunan desa	a. Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	1 Desa	50.000.000					DPMD
			b. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Jumlah kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional yang diikuti	1 Kali	45.000.000					DPMD
			c. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan PKK yang dibina	5 Klp	2.263.500.000					DPMD
			d. Pembinaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya	Jumlah lembaga adat istiadat yang mendapat pembinaan	4 Lembaga	15.400.000					DPMD
			e. Ekspose potensi Desa	Jumlah kegiatan Ekspose potensi Desa yang diikuti	1 Kali	30.000.000					DPMD
			f. Pembentukan Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk dan dikembangkan	1 Desa	78.575.000					DPMD



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		40. Program pelayanan kontrasepsi	a. Penyediaan Obat Side Efek	Jumlah Penyediaan obat Side Efek	400 Dos	20.000.000					DPKKB
			b. Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi	Jumlah Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana KB.	1 Unit	2.050.500.000					DPKKB
			c. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB	Jumlah pelaksanaan Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB.	1 Kali	1.016.400.000					DPKKB
			d. Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB	Jumlah pelaksanaan Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB	1 Kali	392.700.000					DPKKB
			e. Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB	Jumlah Kelompok PIK-KRR yang dibina	8 Kelompok	392.700.000					DPKKB
			f. Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Tribina	Tenaga Pendamping Tribina yang dibina	2 Petugas	508.200.000					DPKKB
			g. Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	Jumlah pelaksanaan Penggarapan Advokasi dan KIE Program KKBPK	1 Kali	636.091.000					DPKKB
			h. Komunikasi Informasi dan Edukasi PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	Jumlah Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Bina Balita	1 Unit	1.087.200.000					DPKKB
		41. Program pengembangan industri kecil dan menengah	a. Penguatan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang terbina	4 IKM	15.875.000					Dinas Perdagin
			b. Pengembangan Sistem Informasi Industri dan Perdagangan	Jumlah Usaha Dagang dan Industri yang terdata	625 Usaha	31.345.000					Dinas Perdagin



No.	Isu Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp)	Pentahapan (Triwulan)				OPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		42. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	a. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan pengendalian Program Pengendalian Kemiskinan Daerah	1 Dok.	80.300.000					BAPPEDA
			b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan SDM	Laporan pengendalian Pengembangan SDM	1 Dok.	68.010.000					BAPPEDA
			c. Koordinasi Pokja Pengembangan Sosial Budaya	Laporan pengendalian kinerja Pokja Pengembangan Sosial Budaya	1 Dok.	47.550.000					BAPPEDA
			d. Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP)	Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP)	1 Dok.	700.000.000					BAPPEDA
		43. Program koordinasi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat									
8.	Pola Pikir/Manajemen Perubahan	44. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana aparatur	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan dan Kompetensi Teknis	1 Dok.	56.196.000					Bag. Ortala



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penjaminan kualitas arah reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan dan tujuan yakni pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektifitas dan efisiensi pemerintahan dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Adapun tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan reformasi birokrasi adalah:

1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.
2. Menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu.
3. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan *reward* dan *punishment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup kegiatan monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD merupakan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di tingkat mikro. Sedangkan ruang lingkup kegiatan evaluasi adalah kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD atas pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat mikro meliputi 8 program area perubahan.

Evaluasi juga harus meliputi dampak strategis pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD. Monitoring dan evaluasi sejatinya juga mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Dijelaskan pula dalam pasal 48 ayat (2) huruf (d), dinyatakan bahwa monitoring atau pemantauan adalah suatu proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan penjelasan pasal 48 ayat (2) huruf (c), dinyatakan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan



hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada prinsipnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada *best practices* dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga dalam rangka menggali informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai keberhasilan reformasi birokrasi, tim penjamin kualitas dapat mengacu pada bagian V (daftar uji pemantauan) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Adapun Objek dari Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah Tim reformasi birokrasi di setiap lembaga daerah, tim pengarah dan tim pelaksana. Dalam monitoring dan evaluasi ini dibutuhkan 3 siklus penting yakni:

1. Perencanaan, meliputi kegiatan dalam rangka penetapan target, pemilihan metode serta penentuan langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan dan SDM yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring evaluasi.
2. Pelaksanaan, meliputi kegiatan melaksanakan langkah-langkah kerja yang telah dilaksanakan dengan mendasarkan standar monitoring evaluasi yang berlaku.
3. Pelaporan meliputi kegiatan menyampaikan hasil pemantauan kemajuan dan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi disertai dengan analisis dan saran atau rekomendasi untuk perbaikannya.

Adapun ruang lingkup dampak dari monitoring evaluasi adalah efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas kinerja lembaga daerah. Metodologi pelaksanaan monitoring evaluasi reformasi birokrasi melalui:

1. *Desk monitoring* (membandingkan laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD dengan bukti-bukti yang disampaikan).



2. *Field monitoring*/observasi (observasi langsung, wawancara/permintaan keterangan, dan memberikan kuesioner kepada OPD).
3. Lembar kerja monitoring dan evaluasi (menggunakan *tools* yang telah disepakati bersama). Analisis hasil monev adalah kegiatan terakhir dari tahapan pelaksanaan monitoring evaluasi.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil penilaian lapangan pada tahap pengajuan dokumen Reformasi Birokrasi, rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map Reformasi Birokrasi masing-masing lembaga OPD dengan kemajuan dan dampak strategis yang telah dicapai berdasarkan hasil desk monitoring, evaluasi serta observasi lapangan. Analisis tersebut akan memberikan kesimpulan dan saran yang menggambarkan tingkat kecukupan dokumen dalam rangka pemenuhan pencapaian target atas rencana aksi yang telah ditetapkan oleh lembaga daerah dan ketepatan waktu pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Analisis ini juga akan memberikan rekomendasi/saran yang diperlukan didasarkan atas rencana dan realisasi masing-masing program dan kegiatan.

Penentuan skoring diperoleh dari pembobotan perspektif dikaitkan dengan pembobotan indikator, nilai variabel yang diperoleh, dan bobot individu yang telah ditentukan, pembagian area perubahan dan pembobotannya adalah sebagaimana tabel berikut:

Skoring Hasil Monitoring dan Evaluasi

No.	8 Area Perubahan dan Quick Wins	Bobot (%)	Perspektif/Sasaran/Target	Indikator	Parameter
1	2	3	4	5	6
1.	Penataan dan Penguatan Organisasi	10	24	8	4
2.	Penataan Tatalaksana	10	33	4	5
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	10	25	6	3
4.	Sumber Daya Manusia Aparatur	20	5	9	15
5.	Penguatan Pengawasan	10	4	8	12



No.	8 Area Perubahan dan Quick Wins	Bobot (%)	Perspektif/ Sasaran/ Target	Indikator	Parameter
1	2	3	4	5	6
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10	2	3	7
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan publik	20	3	5	9
8.	Pola pikir (<i>mind set</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) aparatur	10	3	5	12
Jumlah		100	24	42	73

Nilai akhir yang diperoleh dari proses skoring di atas akan dikonversi dalam penilaian kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan rentang nilai tingkat pemenuhan yang merupakan proksi dari parameter.

Nilai tingkat pemenuhan sampai dengan 75 menunjukkan masih perlunya perbaikan pada area-area perubahan Reformasi Birokrasi, adapun tingkat pemenuhan dan rentang skor kualitas adalah sebagai berikut:

Tingkat Pemenuhan dan Rentang Skor Kualitas

No.	Tingkat Pemenuhan	Rentang Skor Kualitas
1	2	3
1.	$90 < \text{skor} \leq 100$	Sangat Baik
2.	$75 < X \leq 90$	Baik
3.	$60 < X \leq 75$	Cukup
4.	$50 < X \leq 60$	Kurang
5.	Skor < 50	Sangat Kurang

Monev dalam hal ini Bagian Organisasi dan Tatalaksana di Sekretariat Daerah akan berperan sebagai leading sektor persiapan, perencanaan dan pelaksanaan monev termasuk pelaporan.



BAB V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna Periode 2019–2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Muna selama kurun waktu tiga tahun. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Salah satu hal penting yang juga harus dipahami bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi juga ditentukan oleh komitmen pimpinan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan OPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna 2019–2021 dilakukan dengan memperhatikan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2016–2021. Dokumen ini dapat dirubah sesuai ketentuan dan perkembangan lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Muna. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi berisi rencana reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama tiga tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcomes*. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Muna.



Meskipun dalam rencana aksi sudah diuraikan langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam prakteknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Oleh Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Muna harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Muna telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI MUNA,

ttd

L.M RUSMAN EMBA